

PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN (Permasalahan dan Kebijakan) di Kotamadya Padang

Oleh :

DR. H. Nurtain

UNIVERSITAS PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TANGGAL TEL.	: 27-12-2001
SUMBER/MARGA	: <i>Hodiah</i>
KOLEKSI	: <i>K</i>
NO. INVENTARIS	: <i>713/K/2001-P1/21</i>
KLASIFIKASI	: <i>370.NUR-1</i>

K

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Makalah

Disajikan Dalam Musyawarah Penyusunan Pola
Dasar Pembangunan dalam REPELITA VI
Kodya Daerah Tingkat II Padang
tanggal 1-2 Februari 1993

I. PERMASALAHAN PENDIDIKAN

Permasalahan pendidikan dalam Kotamadya Padang, pada umumnya tidak berbeda dari permasalahan pendidikan di daerah Sumatera Barat, bahkan tidak berbeda dari permasalahan pendidikan pada Kotamadya lainnya di Indonesia.

Namun demikian, karena situasi lokal yang berlainan, dan tiap kota memiliki ciri-ciri yang khusus dalam sistem sosial, ekonomi, kebudayaan, dan adatnya, maka permasalahan yang timbul akan beragam pula.

Bila permasalahan berbeda-beda dan situasi kondisi yang dihadapi bervariasi pula, maka kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah barang tentu bermacam-macam pula. Oleh karena itu, makalah ini akan mencoba menyetengahkan permasalahan-permasalahan spesifik yang dihadapi dan memaparkan berbagai kebijaksanaan yang dianggap lebih cocok untuk memecahkan masalah tersebut.

A. Permasalahan Pendidikan Pra Sekolah

Animo masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke dalam pendidikan Pra Sekolah relatif masih rendah. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat yang berdiam di daerah pinggiran kota dan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah di dalam kota. Keadaan ini dapat dipahami bila kita memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat pada kedua lokasi yang dihuni kelompok masyarakat itu. Masyarakat pinggiran kota kurang berminat untuk memasukkan anaknya ke dalam pendidikan Pra Sekolah, karena rumah pemukiman penduduk yang terpencar-pencar, di samping lembaga pendidikan Pra Sekolah di daerah tersebut masih langka. Karena itu lebih aman bagi orang tua yang mempunyai anak usia Pra Sekolah (5-6 tahun) menunggu sampai anak mereka matang masuk Sekolah Dasar (6-7).

Bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah di dalam kota, rendahnya animo memasukkan anaknya ke dalam Pendidikan Pra Sekolah, disebabkan oleh alasan-alasan ekonomi, di samping alasan keterbelakangan budaya. Para orang tua ini pada umumnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan fisik.

Masalah pendidikan Pra Sekolah yang lain ialah pemerintah belum mampu mengangkat guru untuk pendidikan Pra Sekolah. Kejadian ini kelihatannya memang

belum mendapat prioritas dalam perencanaan pembangunan di masa lalu, meskipun pendidikan Pra Sekolah ini sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu tidak mengherankan, bila pendidikan Pra Sekolah ini lebih banyak dikelola oleh lembaga swasta dibandingkan dengan yang diusahakan pemerintah. Konsekuensinya ialah biaya yang harus dipikul oleh orang tua anak usia Pra Sekolah ini relatif lebih mahal.

Di samping itu, guru-guru yang memiliki pendidikan khusus untuk mengajar pada pendidikan Pra Sekolah, dewasa ini sangat langka. Bila ada keinginan swasta dan pemerintah untuk mengangkat guru-guru ini, maka akan mengalami kesulitan dalam mencari tenaga yang dapat diandalkan, lebih lagi setelah SPG yang mengkhususkan diri menghasilkan calon guru Pra Sekolah dihapuskan dan berintegrasi menjadi program PGSD guru kelas.

B. Permasalahan Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar di masa depan akan mengalami perubahan yang mendasar dan berdampak ganda. Menurut Undnag-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990 pasal 1 dan 2 ternyata Pendidikan Dasar memerlukan waktu 9 tahun, yaitu program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SMTP.

Untuk program pendidikan SD masalah yang menonjol adalah rendah daya serap siswa pada EBTANAS dalam beberapa tahun terakhir ini. Rendahnya daya serap itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Kemampuan dan daya tangkap siswa yang masih rendah.
2. Kualitas dan kesungguhan guru yang masih kurang meyakinkan.
3. Fasilitas belajar yang masih belum sesuai dengan standar.
4. Sistem pengelolaan yang masih belum sesuai dengan standar.
5. Pelaksanaan kegiatan supervisi yang masih lemah.
6. Sistem insentif yang belum merangsang kegairahan mengajar dan membimbing siswa.
7. Jumlah guru kelas yang sangat kurang dibanding jumlah kelas yang ada.

Bertitik tolak dari faktor di atas, tampak jelas bahwa rendahnya daya serap siswa pada EBANAS beberapa tahun yang lalu, telah diperkuat oleh kelemahan pada hampir semua lini.

Permasalahan program pendidikan tingkat SMTP, kelihatannya hampir sama dengan permasalahan pendidikan tingkat SD. Bedanya yang menonjol antara lain :

- a. Program studi pendidikan SMTP, tidak mengenal sistem pengelolaan yang rancu dan tumpang tindih.
- b. Guru bidang studi belum tersebar secara proporsional menurut kebutuhan tiap sekolah, sehingga satu SMTP memiliki guru bidang studi yang berlebihan, sementara SMTP yang lain belum/tidak memiliki guru bidang studi tersebut sama sekali.
- c. Sebagian SMTP masih berada dalam lokasi yang sangat ribut dan membisingkan sehingga mengganggu ketenangan dan ketentraman belajar.
- d. Ruang belajar yang sangat kurang, sehingga rata-rata tiap ruang belajar ditempati oleh lebih dari 60 orang siswa. Keadaan ini sungguh sangat memperhatikan.

Masalah Pendidikan Dasar akan bertambah sulit, bila pada suatu ketika di masa depan program pendidikan 6 tahun untuk SD dan program pendidikan 3 tahun untuk SMTP telah berada dalam satu wadah baru Pendidikan Dasar 9 tahun dan bertempat pada satu lokasi. Masalahnya ialah apakah lembaga Pendidikan Dasar 9 tahun akan dikelola oleh dua departemen seperti dewasa ini.

C. Permasalahan Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah di sini adalah pendidikan menengah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 pasal 15 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 pasal 4 dan 5. Dalam hubungan ini permasalahan pendidikan menengah akan mencakup semua bentuk satuan pendidikan menengah di Kotamadya Padang.

Permasalahan pendidikan menengah di Kotamadya Padang meliputi antara lain :

1. Ruang belajar sangat kurang sehingga ke dalam satu ruang belajar rata-rata ditempati oleh 69 siswa. Keadaan ini tetap memprihatinkan. Siswa kurang mendapat layanan dan kesempatan untuk belajar penuh.
2. Sungguhpun rasio guru-murid sudah dapat dianggap sesuai dengan standar, akan tetapi penempatan guru bidang studi belum tersebar secara proporsional menurut kebutuhan suatu sekolah.
3. Akibat dari butir-butir di atas timbul permasalahan baru yaitu :
 - a. Sebagian guru mengajarkan bahan pengajaran yang bukan bidangnya atau guru amatir.
 - b. Di pihak lain sebagian guru mendapat beban tugas lebih besar dari jam wajib mengajarnya.
 - c. Sebagian guru yang tidak dapat mengajar di luar bidang keahlian ini mendapat "tugas guru piket" atau "tugas luar" dan relatif ringan serta tidak ada kaitannya dengan bidang studi yang dikuasainya.
 - d. Kualitas daya serap siswa pada khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya akan semakin merosot tajam, karena bahan pengajaran diberikan oleh guru-guru amatiran atau tidak memiliki keahlian dalam bidang studi yang diajarkannya.
4. Fasilitas labor, bengkel, dan perpustakaan pada hampir semua pendidikan menengah umum, menengah kejuruan, menengah keagamaan, dan menengah kedinasan masih sangat jauh dari standar.
5. Kebanyakan ruangan belajar, ruangan kantor, ruangan perpustakaan sudah rusak dan tidak layak pakai pada beberapa pendidikan menengah.
6. Ijazah guru pada hampir semua pendidikan menengah umum, menengah kejuruan, menengah keagamaan, dan menengah kedinasan masih banyak di bawah S1, bahkan ada yang di bawah D3.
7. Masih banyak guru pendidikan menengah umum, menengah kejuruan, menengah keagamaan dan menengah kedinasan yang belum mengikuti Sanggar Pemanapan Kerja Guru (SPKG). Kegiatan SPKG ini baru dikembangkan dalam pendidikan

menengah umum, dan belum dikenal dalam lingkungan pendidikan menengah kejuruan, menengah keagamaan, dan menengah kedinasan.

8. Alumni SPKG melaporkan program yang dilaksanakan di sanggar sangat menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan guru peserta, tetapi ketika mereka akan menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan yang diperoleh itu, terkandas karena tidak adanya dukungan sarana dan dana dari pimpinan sekolah.
9. Belum berfungsinya tenaga supervisi pada semua satuan pendidikan menengah untuk memberikan bimbingan akademik kepada guru yang membutuhkannya. Alasan kurang berfungsinya supervisi itu antara lain :
 - a. Pemilihan terhadap tenaga supervisor belum didasarkan pada kriteria yang jelas, sehingga tenaga yang terangkat adalah tenaga yang tidak terpakai lagi di mana-mana atau sekedar memperpanjang masa dinas dari 55 tahun menjadi 60 tahun.
 - b. Belum adanya usaha pengkaderan tenaga supervisor secara serius sehingga penetapan supervisor ini didasarkan pada pertimbangan praktis saja dan bukan akademis.
10. Kemerosotan kualitas daya serap (hasil belajar) para siswa diperkuat oleh lemah dan kurang berfungsinya tenaga supervisor memberikan bimbingan kepada guru-guru.
11. Kurikulum pendidikan menengah umum, menengah kejuruan, menengah keagamaan, dan menengah kedinasan yang disusun tahun 1984 yang lalu banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, budaya dan Iptek dewasa ini.

D. Permasalahan Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi di Kotamadya Padang seperti juga Pendidikan Tinggi di kota-kota lain banyak menghadapi masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Daya tampung Perguruan Tinggi negeri sangat terbatas, sementara minat lulusan SMA masuk Perguruan Tinggi cukup besar yang kadang-kadang kurang mempertimbangkan kemampuan akademis dan kemampuan ekonomis mereka sendiri.

2. Masih terlalu banyak staf pengajar perguruan tinggi Kotamadya Padang yang kualifikasi ijazahnya di bawah S2 atau kebanyakan menyandang ijazah S1 dan sederajat. Kenyataannya ini secara langsung dapat menurunkan kualitas isi bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa yang akan memperoleh gelar S1 di masa depan.
3. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjutan S2 dan S3, bagi staf pengajar muda di Perguruan Tinggi masih terbatas, karena kemampuan akademis dan kemampuan Bahasa Inggris mereka masih rendah. Dengan demikian kesempatan-kesempatan masuk studi lanjutan S2 dan S3 setelah melalui seleksi masuk, dilewati dengan kegagalan.
4. Rekrutmen (penerimaan) staf pengajar baru pada semua Perguruan Tinggi di Kotamadya Padang masih menerima lulusan S1. Hal ini disebabkan langkanya lulusan S2 dan S3 yang dapat diangkat menjadi staf pengajar Perguruan Tinggi.
5. Terdapat kesenjangan lulusan yang dihasilkan Perguruan Tinggi dengan kebutuhan angkatan kerja dalam masyarakat. Perguruan Tinggi mampu menyiapkan lulusan yang siap latih di satu pihak, sementara lapangan kerja memerlukan angkatan kerja yang siap pakai. Kesenjangan ini semakin dalam karena belum adanya komunikasi dan kerjasama antara dunia Perguruan Tinggi di satu sisi dengan dunia usaha, pertanian, perikanan, perdagangan, perbankan, industri dan jasa perkantoran di sisi lain.
6. Banyak Perguruan Tinggi dalam Kotamadya Padang yang mengarahkan mahasiswanya untuk menjadi tenaga akademis dan kurang upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional. Lulusan akademisi disiapkan untuk menjadi tenaga yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, sementara lulusan profesional diutamakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ke dalam dunia praktek. Dapat diantisipasi bahwa penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang demikian itu akan menjauhkan lulusannya dari kenyataan-dunia kerja dan pembangunan dewasa ini.
7. Hampir semua Perguruan Tinggi belum memiliki Pusat Sumber Belajar (PSB) yang representatif untuk mendukung dan menunjang proses belajar mengajar. Pusat Sumber Belajar (PSB) masih disamakan dengan perpustakaan. Kenyataan dewasa

- ini perpustakaan masih belum memenuhi standar yang diharapkan, baik dilihat dari standar ruang-ruangnya maupun dilihat dari standar koleksi buku teks yang tersedia.
8. Hampir semua Perguruan Tinggi sangat mengutamakan pengembangan proyek pembangunan bidang fisik untuk mengukuhkan keberadaan Perguruan Tinggi tersebut. Akibatnya banyak biaya dialokasikan untuk pembangunan sarana fisik, sehingga pengembangan pembangunan bidang akademis nyaris terabaikan. Dalam kondisi seperti itu mudah diantisipasi pembinaan dan pengembangan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap para lulusan akan lenyap sama sekali.
 9. Belum adanya Badan Akreditasi Nasional di daerah yang akan menilai suatu lembaga Pendidikan Tinggi yang boleh atau tidak melaksanakan Pendidikan Akademik disatu pihak dan lembaga Pendidikan Tinggi yang boleh atau tidak menyelenggarakan pendidikan profesional di pihak lain. Kevakuman Badan Akreditasi Nasional ini, yang sudah barang tentu diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah, memberi peluang yang sangat longgar untuk pendirian suatu lembaga Pendidikan Tinggi. Akibatnya lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kursus atau sejenis penataran sudah berani memberikan gelar (Pelita 30 Januari 1993:1)

E. Permasalahan Pendidikan Luar Sekolah

Permasalahan Pendidikan penduduk yang belum terurus oleh Pendidikan Sekolah dibereskan oleh Pendidikan Luar Sekolah. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan oleh Pendidikan Luar Sekolah ialah :

1. Masih banyak warga masyarakat yang menderita tiga buta, yaitu: buta aksara dan angka Latin, buta Bahasa Indonesia dan pengetahuan dasar. Apapun informasi dan inovasi yang hendak dijalankan akan mengalami kegalalan di tangan penderita tiga buta ini.
2. Makin banyak warga negara yang putus sekolah yang belum mampu memperoleh mata pencarian tetap atau pekerjaan tetap. Dengan demikian warganegara yang putus sekolah ini muncul sebagai tenaga penganggur dan mudah menimbulkan gejolak sosial.

3. Masih banyak lulusan sekolah tertentu atau tingkat pendidikan tertentu yang memiliki ijazah, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja membutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Penambahan pengetahuan dan keterampilan ini didorong untuk memenuhi bakat dan minat di satu pihak, dan dalam usaha untuk meningkatkan prestasi dan menambah penghasilan di pihak lain.

II. KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN

Semua permasalahan pendidikan yang dikemukakan di atas perlu diatasi dengan menggariskan kebijaksanaan yang patut dan mungkin ditempuh dalam Repelita VI pada khususnya dan dalam PJPT II di masa depan pada umumnya.

A. Kebijakan Pendidikan Pra Sekolah

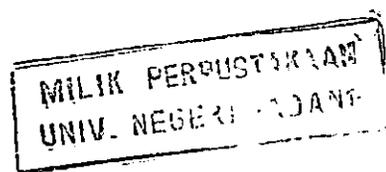
Dalam Repelita VI mendatang, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap penyelenggaraan pendidikan Pra Sekolah. Hal ini perlu diperhatikan karena pengembangan sumber daya manusia di masa balita (4-5 tahun) sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan manusia di masa selanjutnya.

Seiring dengan pengembangan sumber daya manusia ini perlu pula dibentuk pendidikan guru yang khusus dipersiapkan untuk mendidik anak usia 4-6 tahun (Pra Sekolah). Guru pendidikan Pra Sekolah ini sebaiknya setingkat Diploma 2 yang dalam waktu dekat akan diserahkan penyelenggaraannya kepada IKIP atau FKIP dalam Universitas.

Erat kaitannya dengan pengembangan Balita dan Guru Pra Sekolah ini, pemerintah secara berangsur-angsur mendirikan gedung untuk Pendidikan Pra Sekolah sambil mendorong masyarakat untuk berperan lebih besar.

B. Kebijakan Pendidikan Dasar

Untuk mengatasi permasalahan Pendidikan Dasar beberapa kebijaksanaan yang perlu ditempuh antara lain sebagai berikut :



1. Program kelompok Kerja Guru (KKG) di setiap SD Inti terus digalakkan dan diintensifkan untuk saling memberi dan menerima informasi dan perkembangan baru dalam proses belajar mengajar berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Perlu pembenahan dan rehabilitasi beberapa SD yang rusak dan tak layak dipakai lagi untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan di satu sisi dan untuk memberikann ketentraman serta kenyamanan kepada guru dan siswa di sisi lain.
3. Perlu segera dikurangi kerancuan dan ketumpangtindihan pengelolaan pendidikan SD agar para pelaksana di lapangan tidak merasa “kapal satu nakoda dua”. Bagaimanapun juga, langsung atau tidak langsung, diakui atau tidak, pasti mempunyai pengaruh negatif terhadap kelancaran penyelenggaraan pendidikan tingkat SD.
4. Untuk memelihara kegairahan bertugas di kalangan guru SD perlu segera diperhatikan sistem insentif dan promosi menjadi lebih baik dan lebih wajar yang dapat dilihat baik dari segi bentuknya maupun dilihat dari segi prosedurnya.
5. Pemberian kesempatan melanjutkan studi untuk mengambil program PGSD baik melalui penyetaraan belajar jarak jauh (BJJ) maupun penyetaraan tatap muka (TM) tetap dilanjutkan dengan memepertimbangkan berbagai aspek dalam pendidikan tingkat SD.
6. Perlu dipikirkan lebih matang bagaimana sebaiknya pengelolaan Pendidikan Dasar 9 tahun yang mencakup 6 tahun program pendidikan SD dan 3 tahun program pendidikan SMTP. Para perencana dihibau untuk menyusun berbagai alternatif, dengan mengemukakan kekuatan dan kelemahan tiap alternatif. Kepada para pengambil keputusan diharapkan untuk mengambil keputusan secara jernih dan jujur.
7. Di masa depan sudah saatnya pengelolaan Pendidikan Dasar 9 tahun disatu atapkan untuk menghilangkan dualisme administrasi Pendidikan Dasar 9 tahun. Dengan penyatu-atapan Pendidikan Dasar 9 tahun, efisiensi dan efektifitas perencanaan, pelaksanaan, supervisi, koordinasi dan pengawasan menjadi lebih terpadu dan terarah sehingga biaya negara untuk kedua (SD dan SMTP) kegiatan itu dapat dihemat sekitar 50% dari APBN-nya.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

8. Perlu sekali pengaturan kembali penyebaran guru bidang studi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Guru bidang studi yang berlebih di suatu SMTP dipindahkan ke SMTP yang tidak memiliki guru bidang studi itu.
9. Gedung-gedung SMTP yang berada di lokasi yang ribut dan bising oleh arus lalu lintas atau bunyi deru mesin perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih tenang dan nyaman.
10. Perlu penambahan ruang belajar untuk tiap SMTP yang tiap ruang belajarnya ditempati oleh lebih 60 orang siswa. Setiap penambahan ruangan hendaknya dipikirkan pula perluasan program pendidikan SMTP 3 tahun menjadi Pendidikan Dasar 9 tahun, artinya penambahan ruang belajar untuk kelas I sampai dengan kelas VI.
11. Diperlukan pula pemberian kesempatan kepada guru SMTP untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologinya melalui studi lanjutan D3, S1 dan penataran yang relevan.

B. Kebijakan Pendidikan Menengah

Pemecahan masalah Pendidikan Menengah dapat diatasi dengan memperhatikan kebijakan-kebijaksanaan Pendidikan Dasar. Namun demikian untuk hal-hal yang berbeda dan spesifik perlu diambil kebijakan sebagai berikut :

1. Perlu penambahan ruang belajar yang representatif bagi siswa Pendidikan menengah umum, menengah kejuruan, menengah keagamaan, dan menengah kedinasaan.
2. Diperlukan penataan kembali penyebaran guru bidang studi pada tiap-tiap pendidikan menengah. Sebab membiarkan penyebaran guru bidang studi yang tidak seimbang seperti dewasa ini hanya akan memperdalam dan memperbesar kemunduran kualitas lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan menengah ini.
3. Seiring dengan pengaturan distribusi guru bidang studi itu diperlukan penambahan fasilitas labor, bengkel, perpustakaan pada khususnya dan pusat sumber belajar pada umumnya.

4. Diperlukan pemberian kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan lanjutan baik melalui studi lanjutan ke S1, maupun lewat penataran singkat untuk meningkatkan keterampilan di bidang tertentu.
5. Perlu lebih diintensifkan penyelenggaraan PKG dan SPKG untuk menggalang kemampuan profesional dikalangan guru-guru bidang studi yang sama. Pertukaran informasi dan pengetahuan serta pengalaman baru itu dapat memacu kompetensi profesional guru.
6. Para Kepala Sekolah diharapkan dapat memanfaatkan alumni S1 perguruan tinggi dan alumni penataran SPKG dengan jalan memberikan fasilitas-fasilitas secukupnya kepada mereka untuk berkarya.
7. Para supervisor atau pengawas perlu lebih diaktifkan dalam simulasi PKG dan SPKG, disamping juga berperan sebagai instruktur dalam Latihan Kerja Guru Inti (LKGI). Dengan cara demikian supervisor atau pengawas dapat memberikan bimbingan akademis kepada guru inti yang bertugas membimbing guru biasa di lembaga pendidikan menengah.
8. Di masa depan tenaga supervisor atau pengawas perlu diseleksi melalui sistem pengkaderan secara tegas, yaitu dimulai dari pemilihan kader dalam pendidikan prajabatan, dibina melalui jabatan guru, wakil kepala sekolah kemudian menjadi supervisor atau pengawas.
9. Khusus untuk pendidikan menengah umum dan kejuruan, agar mereka berpengalaman praktek lapangan, perlu digalakkan kerjasama antara pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan dengan dunia kerja sebagai "Lembaga Pasangannya".

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

D. Kebijakan Pendidikan Tinggi

Dalam menganggulangi masalah Pendidikan Tinggi beberapa kebijakan perlu ditempuh, antara lain :

1. Perlu diberi kesempatan yang luas kepada staf pengajar yang mampu dan mau melanjutkan studinya ke S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Mahasiswa yang berprestasi tinggi, tetapi kurang mampu di bidang ekonomi perlu diberikan beasiswa untuk melanjutkan studinya sampai selesai.

3. Diperlukan sistem rekrutmen staf pengajar perguruan tinggi secara lebih selektif agar diperoleh staf pengajar yang benar-benar mampu dan memiliki potensi besar melanjutkan dan meraih gelar S3.
4. Kiranya sudah saatnya kita memperbanyak pendidikan Politeknik dan akademi untuk memperoleh tenaga profesional di bidang tertentu. Diusahakan Politeknik dan akademi yang dibuka itu harus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang sedang dan akan muncul sekarang dan masa datang.
5. Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan tenaga akademikus (ilmuan) dibatasi pada bidang-bidang ilmu yang penting-penting saja yang memang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
6. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi seperti disebut butir 4 dan 5, maka pada setiap pendidikan tinggi tersebut harus dibangun Pusat Sumber Belajar (PSB), termasuk perpustakaan dengan segala kelengkapannya, media dengan segala perangkatnya.
7. Sudah tiba saatnya dalam pengembangan dan pembangunan Pendidikan Tinggi diprioritaskan pengembangan dan pembangunan bidang akademis tanpa mengabaikan pengembangan dan pembangunan bidang fisik sama sekali. Dengan demikian dapat dipacu kualitas hasil pendidikan tinggi.
8. Diharapkan dalam waktu dekat telah dibentuk Badan Akreditasi Nasional di daerah yang bertugas untuk memberikan status tertentu kepada suatu Perguruan Tinggi tertentu.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

E. Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah

Mengatasi permasalahan Pendidikan Luar Sekolah ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Diperlukan usaha pemberantasan tiga buta; buta aksara dan angka Latin, buta Bahasa Indonesia dan Pengetahuan dasar, agar informasi dan inovasi yang dilaksanakan tidak mengalami kegagalan.
2. Kepada warganegara yang putus sekolah perlu diberi penyuluhan dan bimbingan secara terarah dalam kelompok-kelompok belajar. Bahan-bahan yang diberikan

hendaknya dapat membantu mereka mencari sumber mata pencaharian menolong hidupnya (pendidikan upajawa).

3. Terhadap warganegara yang sudah memiliki ijazah tertentu yang ingin menambah pengetahuan dan keterampilannya baik karena panggilan bakat dan minatnya maupun untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitasnya perlu diberikan berbagai macam kursus, penataran dan latihan sampai kepada suatu bentuk pendidikan bagi orang dewasa.

Padang, 30 Januari 1993

Daftar Referensi

- “Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1990,” tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- “Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990,” tentang Pendidikan Dasar (SD dan SMTP).
- “Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 1990,” tentang Pendidikan Menengah (SMU dan SMK).
- “Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 1990,” tentang Pendidikan Tinggi.
- “Pentingnya Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk Mengontrol Kualitas Pendidikan Nasional,” Pelita, 30 Januari 1993.
- “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) No. 2 tahun 1989,” tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG